

## PGRI Kota Bandung Nilai Persoalan Narkoba Tanggung Jawab Bersama

**BANDUNG (IM)** - Ketua PGRI Kota Bandung, Cucu Saputra mengatakan, persoalan narkoba merupakan tanggung jawab bersama termasuk entitas pendidikan.

“Peranan pendidikan dalam wadah PGR Kota Bandung memiliki peranan strategis dalam memberikan ruang aksesibilitas bagi pencegahan penetrasi narkoba bagi generasi muda,” ujar Cucu Saputra, Selasa (28/6).

Dia menegaskan, untuk itu dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan PGRI Kota Bandung dan orang tua. Hal ini sebagai bagian terpenting untuk membentengi setiap generasi muda dari serangan berupa kesempatan sekecil apapun penyebaran narkoba.

Sharing informasi sebagai upaya preventif menjadi sebuah keharusan yang terus terbangun karena berdasarkan ciri-ciri tertentu orang tua dan civitas akademika dapat mengetahui gejala anak yang teridentifikasi menggunakan narkoba.

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap 26 Juni itu seharusnya menjadi momentum sebagai ruang penyadaran bagi seluruh warga bangsa yang memberikan penegasan serius tentang masalah yang sangat menghancurkan generasi muda bangsa.

Keberadaannya, sudah menembus benteng-benteng yang sejatinya sulit ditembus baik ruang teritorial maupun ruang penggunaannya. ● **pur**

## PD Pasar Kota Tangerang Tak Wajibkan Pembeli Migor Curah Pakai PeduliLindungi

**TANGERANG (IM)**- Calon pembeli minyak goreng curah di pasar yang dinaungi oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang, Banten, tidak akan diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang, Titien Mulyati mengatakan, pihaknya tak mewajibkan pembeli untuk menggunakan aplikasi itu karena stok minyak goreng curah sudah banyak tersedia. “Enggak (mewajibkan pakai PeduliLindungi). Kita mah enggak ribet, stok (minyak goreng curah) banyak di pasar,” paparnya saat dihubungi, Selasa (28/6).

“Iya, untuk minyak goreng curah, kita enggak pakai apa-apa,” sambung dia.

Menurut Titien, harga minyak goreng curah di pasar yang dinaungi PD Pasar Kota Tangerang sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Satu liter minyak goreng curah dipatok seharga Rp 14.000. Sementara itu, satu kilogram minyak goreng curah dijual sebesar Rp 15.500. “Sekarang (harga minyak goreng curah) sudah normal semua, Rp 15.500 per kilogram. Ada yang Rp 14.000 per liter,” ucapnya. Dengan demikian, kebijakan PD Pasar Kota Tangerang berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah pusat.

Untuk diketahui, pemerintah pusat bakal memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, nantinya setelah masa sosialisasi selesai, proses penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Sementara itu, warga yang belum punya PeduliLindungi masih bisa membeli MGCR dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Luhut menyebutkan, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK per harinya. Pemerintah menjamin, masyarakat bisa memperoleh minyak tersebut dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Minyak goreng dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih. ● **pp**

## Pemprov Sumut Kucurkan Rp2,7 Triliun untuk Perbaiki dan Bangun Jalan

**MEDAN (IM)**- Pemerintah Provinsi Sumut mulai mengerjakan proyek pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang rusak sepanjang 450 kilometer di daerah itu dengan nilai Rp 2,7 triliun.

“Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan yang segera dimulai ditargetkan selesai akhir tahun 2023,” ujar Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi.

Menurut dia, pembangunan dan perbaikan jalan itu sudah sangat mendesak. “Jadi memang harus segera dikerjakan dengan dana Rp 2,7 triliun,” ujar dia, usai acara groundbreaking pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase di Desa Suka Makmur, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Berdasarkan data dari Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut ada sekitar 580 km jalan provinsi dengan status rusak total.

Namun, Sumut hanya punya dana anggaran sebesar Rp 2,7 triliun dengan kemampuan membangun dan memperbaiki 450 km. “Pemprov Sumut maunya bisa memperbaiki semua, tetapi sampai 2024 dana yang dimiliki Rp 2,7 triliun. Jadi harus memilih yang prioritas,” katanya.

Jalan sepanjang 450 km yang dibangun dan diperbaiki ini tersebar di 33 kabupaten/kota, kecuali Labuhanbatu Selatan yang tidak memiliki jalan provinsi. Salah satu proyeknya di Desa Suka Makmur, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Dia menjelaskan, di Suka Makmur jalan yang akan dibangun sepanjang 12 km ditambah jembatan. Jalan itu akan sejajar dengan jalan utama Medan-Berastagi.

Ada tiga skala prioritas pada pembangunan jalan, drainase dan jembatan itu yaitu jalan strategis pariwisata unggulan, jalan penunjang prioritas nasional dan usulan

kepala daerah.

Jalan di Desa Makmur termasuk prioritas utama karena Berastagi merupakan kawasan pariwisata unggulan Sumut. “Jalan itu strategis, jadi harus sejajar dengan jalan utama, bukan alternatif biasa karena diperlukan untuk memperlancar arus wisatawan, distribusi hasil tani dan pembangunan,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Bambang Pardede, mengatakan, dari 450 km yang akan dibangun dan ditingkatkan, terdapat 250 km yang masih berupa jalan tanah. Sedangkan untuk drainase, Pemprov Sumut akan membangun sepanjang 71 km dan jembatan sebanyak 20 titik. “Itu satu paket, jalan harus punya drainase agar bertahan lebih lama dan jembatan untuk menyambungkan jalan tersebut,” katanya.

Pembangunan jalan sepanjang 450 km, 71 km merupakan drainase dan 20 titik untuk 121 jalan dan dibagi 163 paket. Metode pekerjaannya “design built” terintegrasi (rancang dan bangun) dikerjakan secara simultan dan paralel sehingga lebih cepat rampung ketimbang menggunakan metode konvensional.

Pembayaran juga dilakukan dengan sistem tahun ganda (multiyears) dari tahun 2022 hingga 2024. Pembayaran pertama dilakukan akhir 2022 sebesar Rp 500 miliar. Kemudian akhir 2023 Rp 1,5 triliun dan akhir 2024 Rp 700 miliar. “Targetnya 18 bulan selesai dan dengan metode tersebut, proyek pembangunan tersebut bisa lebih cepat rampung dari metode konvensional,” katanya.

Sistem itu tidak perlu menunggu Detail Engineering Design (DED) baru pengerjaan fisik. “Sistem itu sudah diterapkan di Kementerian PUPR,” ujar Bambang Pardede. ● **yan**

# 8 | Nusantara



**WARGA KUMPULKAN TUMPAHAN MINYAK DI CILACAP**

Petugas dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap melakukan penyedotan tumpahan minyak mentah yang dikumpulkan warga di Dermaga PT Pelindo, Jateng, Selasa (28/6). PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap bersama nelayan dan warga masih melakukan pembersihan tumpahan minyak mentah yang diketahui pertama kali pada Senin (27/6) sore.

## Bima Arya: Honorer Dihapus Lumpuhkan Pengawasan Lingkungan di Bogor

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan di kotanya kekurangan personel bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan. Apa lagi, setelah ada pengintegrasian sistem secara digital antara kementerian dengan semua dinas. Ia mengaku kesulitan menemukan ASN yang melek digital.

**BOGOR (IM)** - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menilai penghapusan tenaga kerja honorer pada November 2023 mendatang akan berdampak pada nasib lingkungan

di Kota Hujan tersebut.

Pasalnya, pengawasan lingkungan banyak diisi oleh tenaga honorer, bukan aparat sipil negara (ASN). “Kalau honorer betul

betul selesai di 2023, lumpuh semuanya. Pengawasan dan pengintegrasian sistem dan sebagainya,” kata Bima dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (28/6).

Bima mengungkapkan di kotanya kekurangan personel bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Apa lagi, kata Bima setelah ada pengintegrasian sistem secara digital antara kementerian dengan semua dinas. Ia mengaku kesulitan menemukan ASN yang melek digital.

“Kami masih kurang personel yang memiliki kompetensi di bidang digital,” ujar dia.

Persoalan tersebut, menurut Bima semakin rumit nanti-

nya jika pemerintah benar-benar menghapus tenaga kerja honorer.

“Padahal ini membutuhkan banyak sekali keterampilan digital yang tidak mungkin dipenuhi oleh ASN. Jadi selama ini yang digital digital ini kebanyakan diisi honorer,” ucapnya.

Sebagai informasi pemerintah pusat akan menghapus penggunaan tenaga honorer di setiap tingkat pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

Kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Senin (17/1) lalu.

Namun, rencana penghapusan honorer itu mendapat keberatan dari para pemerintahan daerah di Indonesia. Gubernur seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyatakan permintaan itu hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang digelar April 2022 lalu di Bali. Kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Jadi gubernur se-Indonesia memang berharap kebi-

jakan ini ditinjau ulang, karena ini akan berdampak pada kehidupan tenaga honorer yang selama ini menggantungkan hidupnya di pekerjaan ini,” kata Mahyeldi.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) juga menyerukan hal yang sama.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan yang juga Sekjen APKASI meminta pemerintah pusat agar menunda rencana penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayan publik.

“Kami dengan beberapa kabupaten dan kota berharap penghapusan tenaga kontrak di pemerintah pusat dapat ditunda sampai selesainya rangkaian Pemilu serentak 2024. Rekomendasi ini bahkan dikeluarkan sebagai salah satu usulan dalam Rakernas XIV APKASI tahun 2022 baru-baru ini di Bogor,” kata dia, Jumat (24/6).

Di satu sisi, pelaksanaan honorer-terutama pemberian upah kerja-tak lepas dari masalah di tingkat bawah. Salah satunya diungkap mantan honorer di NTT kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pudencia yang berasal dari Ende bercerita kepada Jokowi soal pengalaman tak digaji selama bekerja sebagai honorer di sebuah puskesmas. Oleh karena itu, ia mulai mencoba ikut program Kartu Prakerja.

“Saya mengikuti pelatihan Prakerja waktu masih honorer di puskesmas. Kami di NTT kalau honorer tidak digaji,” kata Dea pada Temu Raya Kartu Prakerja di Sentul, Bogor, Jumat (17/6).

Saat ini, Dea telah bekerja di sebuah bandara kecil di Sabu Raiju. Dia berharap program Kartu Prakerja tetap berlanjut meski Jokowi tak lagi menjabat presiden. ● **pp**

## Ribuan Sapi dan Kerbau di Kab. Bogor Diberi Vaksin PMK

**CIBINONG (IM)** - Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor secara serentak menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) Aftopor Boehringer kepada ribuan sapi di Bumi Tegar Beriman.

Agar bisa serentak dan tuntas dalam beberapa hari, Diskanak Kabupaten Bogor pun melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan hewan dari instansi lain, termasuk dari IPB University dalam melakukan vaksin PMK terhadap hewan ternak tersebut.

“Mulai kemarin kami sudah menyuntikkan vaksin PMK Aftopor Boehringer kepada ribuan ekor sapi maupun kerbau, total kita sudah mendapatkan 7.800 dosis vaksin PMK Aftopor Boehringer tersebut dari Kementerian Pertanian melalui Pemprov Jawa Barat,” kata Kepala Diskanak Kabupaten Bogor, Oetje Soebagdja kepada wartawan, Selasa (28/6).

Oetje Soebagdja menuturkan bahwa sapi dan kerbau yang disuntik vaksin PMK Aftopor Boehringer adalah hewan ternak yang dalam kondisi

sehat atau negatif terpapar wabah PMK.

“Syarat boleh divaksin PMK Aftopor Boehringer, adalah sapi dan kerbau yang dalam kondisi sehat. Jumlah sapi yang divaksin, seimbang dengan jumlah sapi yang sakit dan akan melebihi karena sehari kemarin, sudah ada 2.052 ekor sapi dan kerbau yang kami suntik vaksin PMK Aftopor Boehringer,” tutur Oetje.

Ia menambahkan selain proses pencegahan penyebaran wabah PMK melalui menyuntikkan vaksin PMK Aftopor Boehringer ke sapi dan kerbau yang sehat, Diskanak Kabupaten Bogor, juga dibantu instansi lainnya melakukan pengobatan bagi sapi dan kerbau yang terpapar wabah PMK.

“Juga secara swadaya, kami sudah melakukan pengobatan kepada 2019 ekor sapi dan kerbau yang terpapar wabah PMK,” tambahnya.

Diwawancara di tempat yang sama, Kabid Kesmavet Diskanak, Prihartini menjelaskan bahwa dalam kurun waktu segera, Pemkab Bogor akan mengadakan obat-obatan pe-

nyakit PMK.

“Pemkab Bogor sudah mengeluarkan kebijakan penggunaan dana belanja tak terduga (BTI) sebesar Rp 551 juta, mudah-mudahan di awal Bulan Juli, obat-obatan penyakit atau wabah PMK sudah ada dan selanjutnya akan segera disalurkan kepada peternakan sapi di 28 kecamatan (lokasi penyebaran wabah PMK,” jelas Prihartini.

Sementara Heru peternak 33 ekor sapi dan kerbau di Kelurahan Pondok Rajeg, Cibinong berterima kasih atas disuntikkannya Vaksin PMK Aftopor Boehringer kepada hewan ternaknya.

Ia mengaku khawatir dengan cepatnya penyebaran wabah PMK, beruntung dia sudah beberapa bulan terakhir tidak mendatangkan sapi dan kerbau dari daerah lain.

“Cara saya agar hewan ternak saya dalam kondisi sehat adalah mensterilkan kandang sapi dan kerbau dari orang lain, tenaga kesehatan hewan yang datang pun sudah dipastikan sudah memenuhi protokol kesehatan (Prokes) PMK,” ucap Heru. ● **gio**



**PENYUNTIKAN VAKSIN PMK DI KABUPATEN BOGOR**

Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada hewan ternak sapi di salah satu peternakan sapi perah di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6). Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah dosis vaksin untuk mencegah penularan PMK dari Kementerian Pertanian sebanyak 120.000 dosis vaksin untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Jabar.

## Pemkot Bandung Pastikan Flyover Kopo Resmi Dibuka pada Agustus

**BANMDUNG (IM)** - Flyover Kopo rencananya akan diresmikan pada Agustus mendatang. Saat ini, konstruksi tahap pengerjaannya telah hampir rampung yakni mencapai 98 persen.

Humas PT PP, Ulil Albab mengatakan, salah satu kendala pembangunan Flyover Kopo adalah kepadatan lalu lintas. Lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta sangat padat sehingga pembangunannya sedikit terkendala teknis.

“Juga intensitas hujan tinggi. Maka proyek (Flyover Kopo) kita hentikan terlebih dahulu. Jika dilanjut akan membahayakan para pegawai,” kata Ulil Albab, Selasa (28/6).

Ulil Albab pun memastikan, bahwa saluran listrik untuk penerangan jalan di Flyover Kopo sudah tersusun rapi. Diperkirakan akan selesai pada akhir Juni meski secara keseluruhan belum terpasang. “Untuk penerangan me-

yang belum terpasang semua karena memang prosesnya memakan waktu yang banyak. Terlebih, saluran listriknya harus terkonduksi dengan aman. Tetapi, jaringan kabelnya sudah siap,” ucapnya.

Ulil menambahkan, pembangunan Flyover Kopo dapat terbelang cepat. Terhitung dua bulan lalu, sudah dapat beroperasi meskipun belum secara maksimal. Pengerjaannya pun, dilakukan kurang dari dua tahun.

Sebelumnya, Flyover Kopo sempat diujicobakan pada Mei lalu. Beberapa hari lalu juga sempat dibuka untuk uji coba. Salah seorang pengguna jalan, Nia berharap jembatan layang Kopo bisa segera digunakan.

“Sekarang memang terlihat belum rampung 100 persen, jadi kemacetan di daerah Kopo jalur pasar induk ini masih padat. Tetapi, jika sudah selesai kemacetan mungkin dapat teratasi dengan maksimal,” kata Nia. ● **pur**